



RANCANGAN AWAL **RENCANA KERJA** **2025**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) Kota Bandung Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dokumen Renja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 guna memberikan gambaran rencana pembangunan di Kota Bandung lingkup urusan pemerintahan umum, bidang kesatuan bangsa dan politik untuk tahun 2025, setelah *mereview* kembali capaian kinerja tahun sebelumnya, dan akan dijadikan panduan dan pedoman dalam rencana pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Bandung pada tahun 2025.

Renja Bakesbangpol Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025 dan berpedoman kepada Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan tanggal 30 Maret 2023.

Akhirnya kami berharap agar Renja Bakesbangpol Kota Bandung 2025 ini lebih baik dan dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M. Si.

Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19671005 198903 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR GAMBARiii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 9

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....12

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... 12

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN 24

2.3 ISU-ISU PENTING PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH..... 25

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 27

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL39

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 39

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 40

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN52

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK52

BAB V PENUTUP59

5.1 CATATAN PENTING 59

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN 59

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT..... 60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota I-3

Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran I-4

Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen I-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Bandung.II-13

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kota BandungII-24

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota BandungII-20

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol Kota Bandung....III-2

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Bandung III-42

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Kota Bandung.....IV-52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berorientasi pada hasil (*result oriented government*) bermakna pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sehubungan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; maka Bakesbangpol Kota Bandung menyusun Dokumen Renja 2024 yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan pelayanan Bakesbangpol Kota Bandung dapat berperan secara optimal.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renja SKPD sebagai pedoman kerja operasional selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

Bakesbangpol Kota Bandung adalah SKPD di Kota Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dibidang

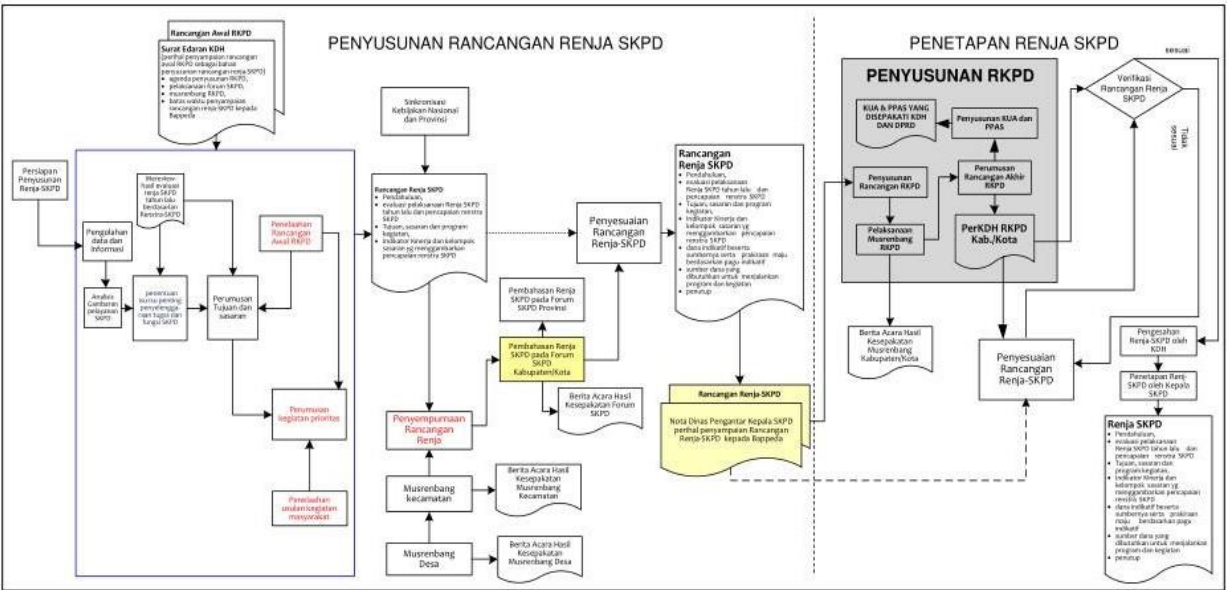


Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Rancangan Renja SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan:

- 1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPD yang mengacu Perkada RKPD;
- 2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
- 3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja, target capaian program/ kegiatan / sub kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan;
- 4. Renja SKPD adalah dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1. 1 Bagan Alur Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota

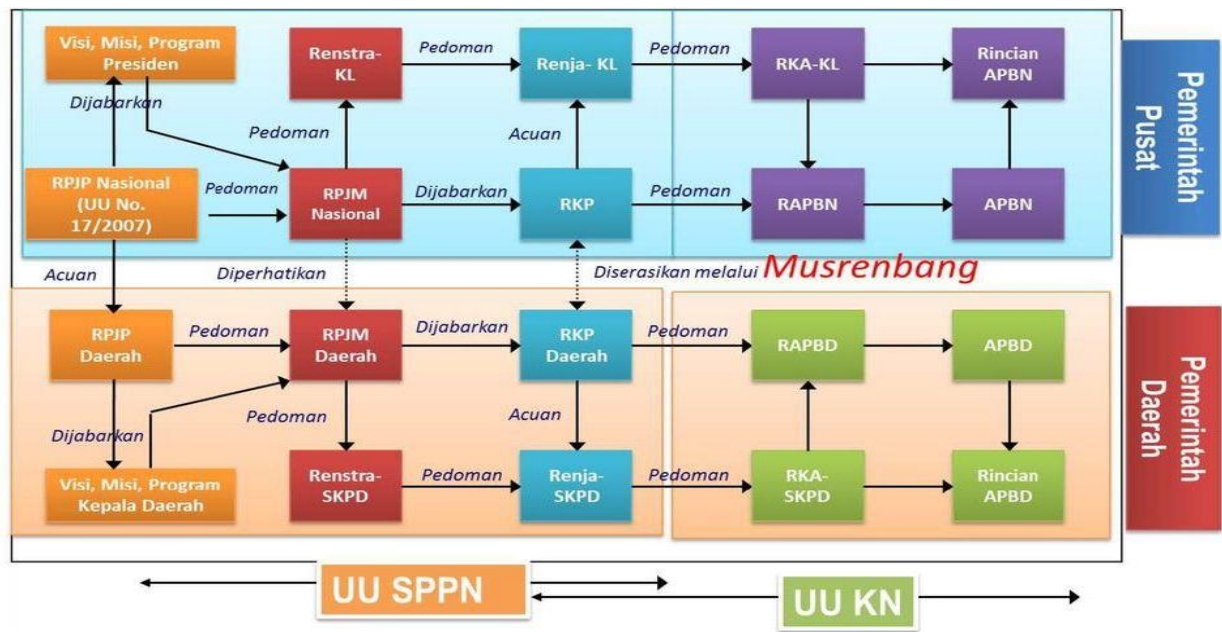
Gambar 1.1

Adapun tahapan persiapan penyusunan renja Perangkat Daerah tertuang dalam Pasal 125 s.d. Pasal 143 Permendagri No.86 Tahun 2017 dengan tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepda tentang pembentukan tim penyusun Renja; orientasi mengenai Renja; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; berpedoman pada Renstra, berdasarkan evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja tahun berjalan. Hasil perumusan rancangan awal Renja, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - pendahuluan;
 - hasil evaluasi Renja tahun lalu;
 - tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - penutup.
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja. Kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah; Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah



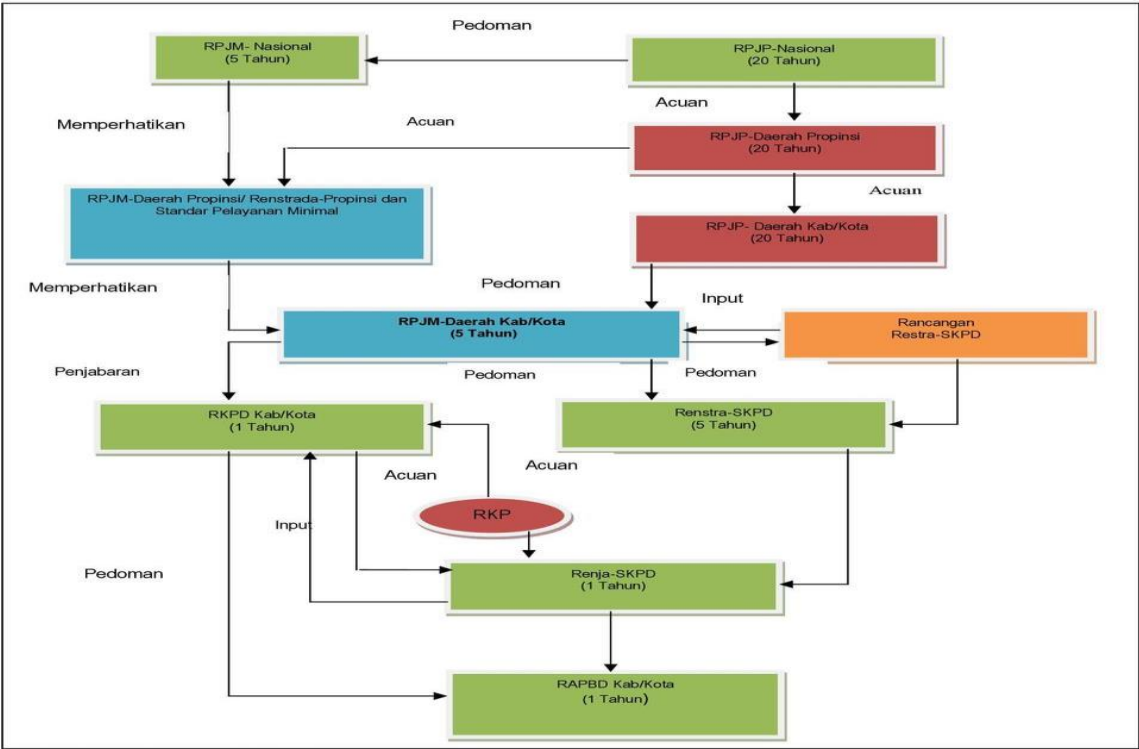
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan terpadu, maka tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa aturan dan pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka perencanaan dan penganggaran serta penyusunan Renja antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan yang terdapat pada, dapat dirinci sebagai berikut:

1.2.1 Aturan umum terkait Penyusunan RENJA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 900.1.15.5-1337 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menter Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.2.2 Aturan yang terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 10. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
 11. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, tentang Hari Bela Negara;
 12. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
 13. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 14. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011, tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.11 Tahun 2006, tentang Komunitas Intelegen Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014, tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
32. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 – 440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
38. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Bakesbangpol adalah untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan Bakesbangpol selama periode satu tahun yaitu tahun 2025 sehingga secara konsekuen dan konsisten dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Bakesbangpol Kota Bandung yang mengacu pada RKPD Kota Bandung Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.



1.3.2 Maksud

Maksud penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Bandung antara lain:

1. Merumuskan dan menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Bakesbangpol yaitu tahun 2025;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tahun 2025;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan selama satu tahun kedepan yaitu tahun 2025;
4. Sebagai bahan dan tolak ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota tahun 2024 terutama dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renja Bakesbangpol Kota Bandung 2024 disusun, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, fungsi Renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Bandung tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yaitu tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu yaitu tahun 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bakesbangpol Kota Bandung.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat Catatan Penting, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Bandung tahun lalu (n-2) yaitu tahun 2023 dan perkiraan tahun berjalan (n-1) yaitu tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun sedang berjalan, yaitu tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bakesbangpol berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun-tahun sebelumnya.

Adapun evaluasi pelaksanaan kinerja Bakesbangpol dapat dilihat pada Tabel 2.1. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi ini diperlukan guna melihat efektivitas program/kegiatan/sub kegiatan, kebutuhan anggaran yang telah dipergunakan dan melihat beberapa realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah memenuhi target, belum memenuhi, atau bahkan melewati target, faktor-faktor penyebab atau yang mempengaruhi terlaksananya suatu program/kegiatan/sub kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target kinerja dan akhirnya kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi beberapa faktor penyebab tersebut.

Nomenklatur program/ kegiatan/sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 c.q. 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk rincinya bisa dilihat di tabel berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4.21	n/a	n/a	n/a	n/a	4,21	4,21	n/a
		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ideologi	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Potensi Konflik yang ditangani Aspek Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Aspek Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10 Kegiatan	4 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	22 Kegiatan	220%
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	780 Orang	1000 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	500 Orang	1600 Orang	205%

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700 Orang	200 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	250 Orang	500 Orang	71%
8.01.02.2.01.06	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	3 Dokumen	n/a	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	200 Orang	6667%
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4.21	n/a	n/a	n/a	n/a	4,21	4,21	n/a
		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Politik	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Potensi Konflik yang ditangani aspek Politik Dalam Negeri	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pembinaan Pendidikan Politik Dalam Negeri	24 Kegiatan	4 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100%	24 Kegiatan	41 Kegiatan	171%
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3321 Orang	500 Orang	1000 Orang	1000 Orang	100%	1000 Orang	2500 Orang	75%

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2562 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	1000 Orang	1400 Orang	55%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4.21	n/a	n/a	n/a	n/a	4,21	4,21	n/a
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Sosial Kemasyarakatan	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Potensi Konflik yang ditangani Aspek Sosial Kemasyarakatan	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat	5 Kegiatan	4 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	34 Kegiatan	680%

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3000 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	100%	1000 Orang	2000 Orang	67%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	4.21	n/a	n/a	n/a	n/a	4,21	4,21	n/a
		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Ekonomi, Sosial, dan Budaya	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Potensi Konflik yang ditangani Aspek Ketahanan Sosial Budaya	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Aspek Sosial Budaya	6 Kegiatan	7 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	19 Kegiatan	317%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	100%	1000 Orang	2000 Orang	100%

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kebebasan dari Diskriminasi	4.21	n/a	n/a	n/a	n/a	4,21	4,21	n/a
		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Kewaspadaan Nasional	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik Lingkup Kewaspadaan Nasional	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pembinaan Aspek Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	10 Kegiatan	4 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%	10 Kegiatan	22 Kegiatan	220%
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Orang	1 Orang	100%

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	920 Orang	500 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	500 Orang	1250 Orang	136%
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	448 Orang	200 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	400 Orang	650 Orang	145%
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	400%
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	A	n/a	n/a	n/a	n/a	A		n/a

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	200%
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Sekretariat)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	47 Orang/Bulan	47 Orang/Bulan	47 Orang/Bulan	100%	42 Orang/Bulan	136 Orang/Bulan	324%
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	200%
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	64 Stel	47 Stel	50 Stel	50 Stel	100%	64 Stel	161 Stel	252%
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Stel	n/a	n/a	n/a	n/a	65 Paket	n/a	n/a
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	200%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	5 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	25 Dokumen	250%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	7 Laporan	700%
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	2 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	10 Unit	10 Unit	100%	10 Paket	21 Paket	210%
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	12 Unit	1 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	12 Unit	26 Unit	217%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	200%
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	200%
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	46 Unit	41 Unit	41 Unit	100%	50 Unit	137 Unit	274%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	50 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	94 Unit	244 Unit	260%
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	300%

Pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun 2024) dan Renja tahun berjalan (tahun 2025) dapat dilihat dalam tabel diatas. Alhamdulillah, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: mulai tahun 2023, pengalihan kegiatan Paskibra ke Bakesbangpol memperkuat fungsi Kesbangpol di dalam pembinaan pemuda dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mengembangkan wawasan kebangsaan kepada calon paskibra Kota Bandung. Serta pembaharuan aturan kodefikasi pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 900.1.15.5-1337 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik: Pasca Pesta Demokrasi sehingga dilakukan koordinasi dengan mitra Partai Politik dalam monitoring dan pengawasan pelaksanaan Pemilu/Pilkada untuk menjaga kondusifitas lingkungan serta kegiatan-kegiatan pendidikan bagi pemilih pemula.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan: koordinasi dengan Organisasi Masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar supaya tetap aman, tentram dan nyaman sehingga tercipta lingkungan yang kondusif.
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial: adanya audiensi yang dilakukan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat serta pengawasan terhadap individu maupun kelompok organisasi Asing.

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan: pelaksanaan kegiatan terfokus pada pelaksanaan paskibra karena menjadi kegiatan yang utama untuk dilaksanakan sehingga untuk kegiatan lainnya perlu menyesuaikan dengan hal tersebut.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik: pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan pasca pesta demokrasi.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan: bertambahnya Organisasi Masyarakat di Kota Bandung membuat sosialisasi orientasi tujuan pembangunan Kota Bandung semakin bertambah.



4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial: adanya kegiatan unjuk rasa di lingkungan Kota Bandung serta orang asing maupun organisasi kelompok asing yang melakukan tindakan yang melanggar aturan.

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN

Dalam bagian ini menyajikan analisa capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sasaran/target Renstra, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta dikaitkan juga dengan peraturan perundang-undangan tentang kinerja pelayanan. Bakesbangpol telah menyusun indikator kinerja pelayanan sesuai tupoksinya yang dituangkan pada Perubahan Renstra Bakesbangpol Tahun 2024-2025 adalah :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik	---	---	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	
	Indeks Perlindungan Kebhinnekaan			N/A	4,21	4,21	4,21	N/A	N/A	4,25	4,3	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	---	---	87.25	89.55	89.60	89.65	87.45	87.03	87.45	87.50	

Catatan: Realisasi tahun 2024 adalah s.d. triwulan I

Untuk indikator Tujuan Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung pada Sasaran Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya diukur dengan Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik, yang dihitung berdasarkan jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik kali 100%. Target harus 100% menunjukkan tidak boleh ada satupun konflik di Kota Bandung, dan syukurlah sampai dengan tahun 2023 target 100% bisa dicapai. Pada tahun 2024-2026 mengalami perubahan indikator yang dapat mendukung tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, saat ini belum terdapat realisasi karena akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 untuk perhitungan pertama.

Selain indikator diatas Kesbangpol memiliki Tujuan Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik dengan Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk mengukurnya memakai cara kuisisioner kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan berupa surat ijin penelitian/kerja praktek/survey. Untuk tahun 2023 target 87,25 bisa dicapai di 87,45 dan untuk tahun 2024 triwulan 1 dari target 89,55 hanya tercapai 87.03 hal ini dirasakan karena adanya peralihan penggunaan aplikasi pendaftaran

pembuatan surat rekomendasi melalui media elektronik yang dibuatkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung sehingga masyarakat masih dalam tahap/proses penyesuaian.

Untuk pencapaian indikator “Indeks Perlindungan Kebhinnekaan” faktor pendukungnya adalah koordinasi yang baik dengan jajaran samping/instansi vertikal; mengoptimalkan koordinasi dengan forum-forum mitra strategis Bakesbangpol (Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat); dan memfasilitasi permintaan izin menyampaikan pendapat di muka umum diarahkan untuk audiensi perwakilan dengan instansi terkait & instansi vertikal; serta koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kota dan Kecamatan. Adapun faktor penghambatnya adalah jumlah responden yang digunakan sebagai sampel.

Sedangkan untuk pencapaian indikator “indeks kepuasan masyarakat” faktor pendukungnya adalah transparansi aturan dan biaya yang nol rupiah, proses lebih cepat melalui media *online*/aplikasi. Adapun faktor penghambatnya adalah kapasitas ruang tunggu kurang memadai dan serta kendala teknis dalam aplikasi pendaftaran melalui media elektronik.

2.3 ISU-ISU PENTING PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol Kota Bandung berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama, dan juga situasi keamanan yang terus mengalami dinamika. memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kota Bandung dapat dikemukakan beberapa isu penting yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai berikut :

1. Isu Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Tantangan Pancasila di Era Globalisasi¹ :

- Menguatnya individualisme

Pada era globalisasi paham-paham terkait individualisme semakin meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya kemudahan pemenuhan kebutuhan yang tak lagi harus dilakukan secara fisik

- Maraknya kosmopolitanisme

Paham kosmopolitanisme yang kuat juga bisa melemahkan identitas dan solidaritas kebangsaan. Padahal sikap solidaritas dan rasa kebersamaan

¹ <https://tirto.id/tantangan-pancasila-di-era-globalisasi-dan-cara-menghadapinya-gP7L>



sebagai satu bangsa Indonesia adalah salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

- Meningkatnya fundamentalisme pasar

Fundamentalisme pasar juga membuat masyarakat terus menerus mengejar keuntungan. Demi mengejar keuntungan tersebut, penganut fundamentalisme pasar akan melakukan apapun, termasuk merebut hak orang lain, dengan kata lain, orang menjadi tak peduli dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Ini termasuk nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial yang dijunjung pada Pancasila.

2. Isu Politik Dalam Negeri

a. Fasilitasi Partai Politik

Parpol tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin, namun juga memperjuangkan kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat. Persoalan Transparansi atas pendanaan Parpol masih menjadi tantangan hingga saat ini.

b. Pemahaman Politik

Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap politik dilingkungan sekitar, terutama bagi pemilih pemula. Karena ada peunurunan partisipasi dari tahun tahun 2019 ke 2024 yaitu 86,87 % mnjadi 84,20 %.

Tabel 2. 3 Proyeksi Tingkat Partisipasi Pemilu

TAHUN PEMILU	PENGUNA HAK PILIH			JUMLAH	DPT MURNI	PARTISIPASI MASYARAKAT (JUMLAH DPT + DPTb + DPK DIBANDINGKAN DENGAN DPT MURNI)	PARTISIPASI MASYARAKAT (JUMLAH DPT DIBANDINGKAN DENGAN DPT MURNI)
	DPT	DPTb	DPK				
1	2	3	4	5 (2 + 3 + 4)	6	7 (5 : 6)	8 (2 : 6)
2019	1.423.804	24.071	63.684	1.511.559	1.739.927	86,87%	81,83%
2024	1.535.965	24.535	15.979	1.576.479	1.872.343	84,20%	82,03%

Sumber : Data Olah (2024)

3. Isu Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya

Intoleransi adalah sikap yang tidak memiliki tenggang rasa atau toleransi. Dikutip dari situs web resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, intoleransi dapat muncul sebagai diskriminasi, seksisme, dan rasisme. Intoleransi dapat dipicu oleh ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perubahan atau perbedaan. Pada era globalisasi, berbagai informasi tentang budaya, ideologi, nilai-nilai, dan agama, dapat terekspos ke seluruh dunia.

Sayangnya, tidak semua orang bisa menerima perbedaan tersebut. Akibatnya, orang yang intoleran cenderung melakukan tindakan diskriminatif terhadap perbedaan baik secara sadar maupun tidak.

Di era globalisasi, terlebih di iklim pasar bebas, orang dengan bebas memperkaya diri sesuai kemampuan mereka. Orang-orang yang punya privilese punya peluang besar dalam upaya menyejahterakan dirinya.

Namun, kalangan menengah ke bawah yang tidak punya privilese akan semakin sulit menjangkau kesejahteraan ekonomi. Selain faktor pendidikan yang tidak merata, kebijakan yang tidak adil juga memengaruhi kemiskinan kalangan bawah. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-5, yang menyebutkan, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Kota Bandung tahun 2025 merupakan langkah awal bagi SKPD dalam penyusunan rancangan awal Renja tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2025. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga menghasilkan program prioritas pembangunan.

Pada tahun 2025 program/kegiatan/sub kegiatan Bakesbangpol mengikuti nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 c.q. Kepmendagri 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023. Rancangan awal Renja tahun 2025 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD sehingga menjadi rumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2025. Berikut ini adalah tabel review terhadap rancangan awal RKPD Kota Bandung Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Bandung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				22.052.515.740	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				21.052.515.740	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik	100%	11.135.874.688	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik	100%	10.135.874.688	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,75				Nilai Sakip Perangkat Daerah	82 Poin		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	11.135.874.688	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	10.135.874.688	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	11.135.874.688	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	10.135.874.688	Adanya Efisiensi
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.928.744.072	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.088.769.092	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik	100%	5.928.744.072	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik	100%	6.088.769.092	
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,75				Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,75		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100%	137.520.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100%	137.520.000	

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	137.520.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	137.520.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100%		264.177.924	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan	100%	264.177.924	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket	87.727.924	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket	87.727.924	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 Orang	176.450.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 Orang	176.450.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100%		1.325.465.880	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum	100%	1.348.619.408	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.040.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.040.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.179.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	101.509.600	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	35.562.558	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	46.625.326	

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	210.371.322	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	210.382.082	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket	219.955.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket	219.955.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	17.077.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	17.077.200	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	740.280.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	751.030.200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan barang milik daerah	100%	499.175.004	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan barang milik daerah	100%	443.260.604	
5	Pengadaan Mebel	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	199.067.104	Pengadaan Mebel	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	199.067.104	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	300.107.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	244.193.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang	100%	2.621.627.764	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang	100%	2.814.413.656	

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	256.608.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	256.608.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.336.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.336.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.325.683.764	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.518.469.656	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100%	1.080.777.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100%	1.080.777.500	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	798.286.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	798.286.500	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	63.860.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	63.860.000	
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	218.631.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	218.631.000	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.496.369.094	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.447.093.900	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4,21	1.496.369.094	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4,21	1.447.093.900	

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pembinaan Aspek Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	41 Kegiatan	1.496.369.094	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pembinaan Aspek Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	36 Kegiatan	1.447.093.900	
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1775 Orang	369.610.094	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1775 Orang	360.602.900	
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	360 Orang	23.760.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	360 Orang	23.760.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	0	
6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	-	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	-	

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan tentang aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	14 Dokumen	295.295.000	Pembinaan tentang aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	1 Dokumen	295.295.000	
	Pembentukan Paskibraka	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paskibraka	1160 Orang	807.704.000	Pembentukan Paskibraka	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Paskibraka	1160 Orang	767.436.000	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				997.579.396	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				947.564.060	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4,21	997.579.396	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4,21	947.564.060	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Pembinaan Pendidikan Politik Dalam Negeri	14 Kegiatan	997.579.396	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Pembinaan Pendidikan Politik Dalam Negeri	14 Kegiatan	947.564.060	
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	900 Orang	489.860.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	900 Orang	489.860.000	

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	584 Orang	507.719.396	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	584 Orang	457.704.060	
	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11 Laporan	0	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	0	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.496.369.094	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.435.614.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Indeks Kebebasan dari Diskriminasi	4,21	1.496.369.094	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Indeks Kebebasan dari Diskriminasi	4,21	1.435.614.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Pembinaan Aspek Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	16 Kegiatan	1.496.369.094	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Pembinaan Aspek Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	16 Kegiatan	1.435.614.000	

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	7.800.000	Penyusunan Dokumen Program Kerja Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	7.800.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	121.140.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	121.140.000	
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2453 Orang	349.866.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2453 Orang	331.200.000	

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1221 Orang	266.557.094	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1221 Orang	252.468.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Laporan	261.936.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	261.936.000	
6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	489.070.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	461.070.000	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				997.579.396	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				997.600.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4,21	407.350.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4,21	407.350.000	

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pembinaan organisasi kemasyarakatan	56 Kegiatan	407.350.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah pembinaan organisasi kemasyarakatan	56 Kegiatan	407.350.000	
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2525 Orang	407.350.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2525 Orang	407.350.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Laporan	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	0	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Indeks Kebebasan Berkeyakinan	4,21	590.229.396	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Indeks Kebebasan Berkeyakinan	4,21	590.250.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Pembinaan Aspek Sosial Budaya	26 Kegiatan	590.229.396	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Pembinaan Aspek Sosial Budaya	26 Kegiatan	590.250.000	
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2165 Orang	590.229.396	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2165 Orang	590.250.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	0	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Babakan Ciamis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	0	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan Bakesbangpol Kota Bandung juga merujuk pada Kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu:

Adapun Tujuan Strategis adalah “Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa” dengan Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan indikator yaitu Indeks Demokrasi Indonesia; Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu; dan Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan indikator yaitu Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM); Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatnya kewaspadaan nasional, dengan indikator yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

Selain menelaah Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri maka di level provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat ditelaah juga Renja Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dengan Tujuannya yaitu “Meningkatnya kualitas demokrasi” dengan Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dengan indikator yaitu Persentase kasus perselisihan antar umat beragama yang diselesaikan.
2. Meningkatnya kohesivitas sosial, dengan indikator yaitu Persentase ormas dan orpol yang berdaya.
3. Meningkatnya kondusifitas daerah, dengan indikator yaitu Angka konflik sosial.



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kota Bandung mengacu pada Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026 setelah menelaah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026. Oleh karena RPD ≥dimaksud tidak memiliki Visi dan Misi karena disusun secara teknokratik, tidak politik, karena belum ada kepala daerah yang terpilih maka hanya Tujuan dan Sasaran saja yang dimuat.

Berdasarkan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026 maka Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kota Bandung adalah sbb:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol Kota Bandung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025
Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial	Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi	Indeks Perlindungan Kebhinekaan (IPK)	4,21
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,60

Tujuan pertama Bakesbangpol Kota Bandung adalah “Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ketentraman dan Sosial” dengan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi” dengan Indikator “Indeks Perlindungan Kebhinekaan (IPK)” dengan target 2025 adalah 4,21

Tujuan keduanya untuk mengukur pelayanan kepada masyarakat adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik” dengan Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Masyarakat Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik” dengan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” dengan target 2025 sebesar 89,60 poin.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan keselarasan perencanaan pembangunan di Ditjen Polpum Kemendagri dan perencanaan di daerah baik RPD maupun Renstra serta peraturan terkini diantaranya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 c.q. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 maka Bakesbangpol Kota Bandung merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun 2024 dengan rekapitulasi yaitu:



Jumlah Program : 6 (enam) buah
Jumlah Kegiatan : 12 (dua belas) buah
Jumlah Sub Kegiatan : 37 (tiga puluh tujuh) buah
Pagu Indikatif APBD : Rp. 21.052.515.740,- (dua puluh satu miliar lima puluh juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
Tabel rencana program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025 dan perkiraan tahun 2026 dalam tabel berikut ini:



Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Bandung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BATASAN PAGU : 22.052.515.740			21.052.515.740,00			23.313.244.831,80
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persertase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik - Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 81,75 Poin	16.064.618.760,00		- 100% - 81,75 Poin	18.552.106.821,60
8.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	137.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100%	151.272.000,00
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	137.520.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6 Laporan	151.272.000,00
8.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10.135.874.688,00	DANA ALOKASI UMUM	100%	12.249.462.156,80
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 Orang/Bulan	10.135.874.688,00	DANA ALOKASI UMUM	42 Orang/Bulan	12.249.462.156,80
8.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Keuangan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	264.177.924,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100%	290.595.716,40
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134 Paket	87.727.924,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70 Paket	96.500.716,40



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 Orang	176.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70 Orang	194.095.000,00
8.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Administrasi Umum	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1.325.465.880,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100%	1.458.012.468,00
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	2.040.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	2.244.000,00
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	100.179.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	110.197.560,00
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	35.562.558,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	39.118.813,80
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	210.371.322,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	231.408.454,20
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Paket	219.955.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	241.950.500,00
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240 Dokumen	17.077.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10 Dokumen	18.784.920,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan	740.280.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9 Laporan	814.308.220,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	499.175.004,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100%	330.118.690,00
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan		62 Unit	199.067.104,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	300.107.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28,00	330.118.690,00
8.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2.621.627.764,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100%	2.883.790.540,40
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	256.608.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12 Laporan	282.268.800,00
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	39.336.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Laporan	43.269.600,00
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	2.325.683.764,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12 Laporan	2.558.252.140,40
8.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILI DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1.080.777.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100%	1.188.855.250,00
8.01.01.2.0001	Penyediaan Jasa Oemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangna Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Unit	798.286.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	47,00	878.115.150,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.01.2.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Unit	63.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95,00	70.246.000,00
8.01.01.2.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	218.631.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,00	240.494.100,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.21	1.496.369.094,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.21	1.491.709.003,40
8.01.02.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Pembinaan Aspek Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Kegiatan	1.496.369.094,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0 Kegiatan	1.491.709.003,40
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1895 Orang	558.238.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500 Orang	614.061.800,00
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360 Orang	23.686.568,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	250 Orang	26.055.224,80

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Keluarga	62.815.526,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200 Keluarga	69.097.078,60
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Dokumen	295.295.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14 Dokumen	324.824.500,00
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	416.064.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3 Kegiatan	457.670.400,00
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Paskibraka	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800 Orang	140.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	800 Dokumen	154.297.000,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.21	997.579.396	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.21	1.097.337.335,60



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.03.1.01	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Jumlah Pembinaan Pendidikan Politik Dalam Negeri	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Kegiatan	997.579.396	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6 Kegiatan	1.097.337.335,60
8.01.03.2.01.0003	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900 Orang	489.860.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	900 Orang	538.846.000,00
8.01.03.2.01.0004	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	584 Orang	507.719.396	PENDAPATAN ASLI DAERAH	584 Orang	558.491.335,60



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		11 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,21	407.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,21	1.239.171.335,60
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	407.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4 Kegiatan	1.239.171.335,60
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	407.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1000 Orang	448.085.000,00
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		10 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH		



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,21	590.229.396,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,21	791.086.335,60
8.1.5.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Aspek Sosial Budaya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Kegiatan	590.229.396,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5 Kegiatan	791.086.335,60
8.1.5.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3000 Orang	590.229.396,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3000 Orang	649.252.335,60
8.1.5.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		2 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kebebasan dari Diskriminasi	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,21	1.496.369.094,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4,21	141.834.000,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.1.6.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pembinaan Aspek Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Kegiatan	1.496.369.094,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0 Kegiatan	141.834.000,00
8.1.6.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	7.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Orang	8.580.000,00
8.1.6.2.01.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	121.140.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Orang	133.254.000,00
8.1.6.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2453 Orang	349.866.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2453 Orang	384.852.600,00



Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2025				Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8.1.6.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1221 Orang	266.557.094	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1221 Orang	293.212.803,40
8 01 06 1.01 0005	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	261.936.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10 Orang	288.129.600,00
8.1.6.2.01.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	489.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5 Orang	537.977.000,00



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan, maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan. Karena perencanaan atau rencana kerja adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Husein Umar, 2009).

Rencana Kerja digunakan dalam manajemen sebagai pedoman pengarahan program/kegiatan/sub kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian dan evaluasi yang disusun pada setiap periode. Pada bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Kota Bandung

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			21.052.515.740
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik	100%	10.135.874.688
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	82 Poin	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	10.135.874.688
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	10.135.874.688
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			6.088.769.092
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terselenggara dengan baik	100%	6.088.769.092
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,75	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100%	137.520.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	137.520.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100%	264.177.924
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket	87.727.924
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 Orang	176.450.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100%	1.348.619.408
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.040.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	101.509.600
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	46.625.326
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	210.382.082
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22 Paket	219.955.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	240 Dokumen	17.077.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	751.030.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan barang milik daerah	100%	443.260.604
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	199.067.104
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	244.193.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang	100%	2.814.413.656
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	256.608.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.336.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.518.469.656
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100%	1.080.777.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	798.286.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	63.860.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	218.631.000
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			1.447.093.900
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4,21	1.447.093.900
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Aspek Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	36 Kegiatan	1.447.093.900
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1775 Orang	360.602.900
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	360 Orang	23.760.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	0
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	-



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pembinaan tentang aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	1 Dokumen	295.295.000
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	1160 Orang	767.436.000
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			947.564.060
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4,21	947.564.060
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pembinaan Pendidikan Politik Dalam Negeri	14 Kegiatan	947.564.060
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	900 Orang	489.860.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	584 Orang	457.704.060
	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	0
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			1.435.614.000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kebebasan dari Diskriminasi	4,21	1.435.614.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pembinaan Aspek Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	16 Kegiatan	1.435.614.000
	Penyusunan Dokumen Program Kerja Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	7.800.000
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	121.140.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2453 Orang	331.200.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1221 Orang	252.468.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	261.936.000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	461.070.000
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			997.600.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kebebasan Politik dan Pemikiran	4,21	407.350.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan organisasi kemasyarakatan	56 Kegiatan	407.350.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2525 Orang	407.350.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	4,21	590.250.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Aspek Sosial Budaya	26 Kegiatan	590.250.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2165 Orang	590.250.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	0



BAB V PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING

Program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seluruhnya bersifat non fisik; lebih kearah fasilitasi dan pembinaan, sehingga tidak terasa langsung di masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memiliki 6 (enam) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif APBD sebesar Rp 21.052.515.740 (dua puluh satu miliar lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) Kota Bandung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Renja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2024-2026.
2. Renja Bakesbangpol Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025.
3. Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah c.q. Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Selanjutnya Renja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2025 akan diinput dalam SIPD sesuai Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan besaran anggaran sesuai Surat Edaran Walikota atau Sekretaris Daerah Kota Bandung yang mencantumkan pagu anggaran.
5. Menyikapi Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2025 maka akan dilakukan Perubahan Renja Bakesbangpol Kota Bandung tahun 2025 seperlunya.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengoptimalkan seluruh Anggaran dan mencapai hasil (*outcome*) program maupun keluaran (*output*) kegiatan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung akan lebih meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk “Meningkatnya Kualitas Kesatuan Bangsa dan Demokrasi” di Kota Bandung.

Tema seluruh sub kegiatan akan disesuaikan dengan isu yang hangat baik isu lokal maupun nasional, karena isu mengenai kesatuan bangsa dan politik sangat dinamis.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,

Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M. Si.

Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19671005 198903 1 008